

Penculikan anak perempuan merupakan hal yang kerap terjadi di NTT. Sejumlah anak (dibawah 18 tahun) dikirim menjadi pembantu ke luar negeri atau di provinsi lain di Indonesia. Identitas mereka dipalsukan. Wilfrida Soik adalah salah satu korban pemalsuan identitas dari anak menjadi dewasa. Meskipun kasus Wilfrida kini sudah dikenal dunia, tetapi tidak berarti praktek pengiriman anak terhenti. Sebaliknya berbagai rekrutmen anak tetap marak.

Para pelaku *trafficking* menggunakan berbagai jalur untuk mengirimkan para korban keluar negeri, baik melalui jalur darat, maupun jalur laut. Sejauh ini proses pemantauan terbanyak masih menasar korban yang berasal dari Timor Barat maupun Pulau Sumba di NTT, sedangkan pemantauan perdagangan orang untuk wilayah Flores sejauh ini masih tergolong minim. Berita yang terangkat umumnya hasil pengaduan orangtua yang anaknya diculik. Sedangkan insiatif langsung dari aparat keamanan masih jarang ditemukan.

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan perdagangan orang yang makin marak di Indonesia, khususnya di NTT. DPO adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni *Pos Kupang* (PK), *Timor Express* (TE) dan *Victory News* (VN) sebagai referensi utama, yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (*human trafficking*) baik di lingkup domestik maupun internasional. Selain tiga media di atas, DPO IRGSC juga menggunakan berita *on line* lain sebagai alat verifikasi. Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat terbukti penanganan buruh migran tidak semakin baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, oleh berbagai institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL (Petugas/Perekrut Lapangan))

Penerbitan **DPO IRGSC** adalah bagian dari pengembangan **NTT Studies** oleh **IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)**. **Peneliti:** Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, Joseph Robert, Indra Johannes Kiling **Koordinator:** D.Elcid Li. Riset ini merupakan bagian dari 'riset aksi' yang dilakukan IRGSC dalam **Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)** yang melibatkan berbagai elemen seperti: **JPIT** (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), **PIAR** (Pusat Informasi Advokasi Rakyat), **Rumah Perempuan**, **JRUK** (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun secara individual.



Daftar Isi

Daftar Singkatan.....	6
Ringkasan Berita April 2014	7
Analisis Berita Media	10
Daftar Perusahaan/Individu Yang Perlu Diawasi/ Dihukum	11
Daftar Instansi Publik/ Pemerintahan Yang Perlu Diawasi	13
Ringkasan Berita Surat kabar	15
Selasa, 1 April 2014	15
Tuntutan terhadap Wilfrida Dikabulkan (VN, hal 10)	15
Kamis, 3 April 2014	15
KP3 Laut Tenau Tangkap 16 TKI Ilegal (VN, hal 9).....	15
Kamis, 3 April 2014	15
RSUD Rawat TKW yang Depresi karena Dianiaya (VN, hal 15)	15
Senin, 4 April 2014	16
Kadis Nakertrans Kupang Ditahan (PK, hal 1)	16
Jumat, 04 April 2014	16
16 Canaker Ilegal Diamankan (TE, hal 12).....	16
Selasa, 8 April 2014	17
Wilfrida Menangis Divonis Bebas (PK, hal 1)	17
Selasa, 08 April 2014	17
Wilfrida Bebas hukuman Mati (TE, hal 1)	17

Selasa, 8 April 2014	18
Wilfrida Divonis Bebas Dari Hukuman Mati (VN, hal 9).....	18
Selasa, 08 April 2014	18
Polisi Gagal Pengiriman TKI Ilegal Asal NTT (TE, hal 1).....	18
Kamis, 10 April 2014	18
NTT Apresiasi Pembebasan Wilfrida (VN, hal 10)	18
Sabtu, 12 April 2014	19
Pemimpin Tegas Untuk Atasi Human <i>Trafficking</i> (VN, hal 3)	19
Minggu, 13 April 2014.....	19
NTT Terima Korban Kekerasan Medan (PK, hal 6)	19
Minggu, 13 April 2014.....	20
NTT Tertinggi Soal <i>Trafficking</i> (PK, hal 6).....	20
Minggu, 13 April 2014.....	20
Pelajaran Berharga Dari Wilfrida Soik (VN, hal 3)	20
Minggu, 13 April 2014.....	20
Tuntaskan Kasus TKI di NTT (VN, hal 3).....	20
Kamis, 17 April 2014	21
Penyelundupan TKW Nagekeo Digagalkan (PK, hal 20).....	21
Senin, 21 April 2014	21
TKW Penyelesaian di Medan Dibina Kemensos (VN, hal 9)	21
Rabu, 23 April 2014.....	21
Tujuh TKW Ilegal Asal NTT Ditangkap di Surabaya (VN, hal 9)	21
Kamis, 24 April 2014	22

Besok Korban <i>Trafficking</i> Medan Akan Dipulangkan (VN, hal 9).....	22
Jumat, 25 April 2014	22
Lima Calon TKW Segera Dipulangkan (PK, hal 20)	22
Jumat, 25 April 2014	23
Jaksa Banding, Wilfrida Terancam Dipenjara Lagi (VN, hal 9)	23
Jumat, 25 April 2014	23
Pemprov Dinilai Tidak Siap Sambut TKW Medan (VN, hal 9).....	23
Sabtu, 26 April 2014.....	23
Korban <i>Trafficking</i> Medan Tiba di Kupang (PK, hal 11)	23
Sabtu, 26 April 2014.....	24
Pertentangan Warnai Penyambutan TKW Medan (VN, hal 10)	24
Senin, 28 April 2014	24
Pemangku Kepentingan Harus Temukan Solusi (TE, hal 11).....	24
Senin, 28 April 2014	25
Pemprov NTT Dinilai Tidak Manusiawi (VN, hal 9)	25
Selasa, 29 April 2014	25
Dewan Kecam Alasan Ketiadaan Dana dari Pemprov (VN, hal 9).....	25
Rabu, 30 April 2014.....	26
49 Calon TKI Ilegal Diamankan (VN, hal 1).....	26
Rabu, 30 April 2014.....	26
TKW Medan Pulang Tanpa Gaji (VN, hal 10).....	26

Daftar Singkatan

CANAKER	: Calon Tenaga Kerja
KADIS	: Kepala Dinas
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KP3	: Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan
NAKERTRANS	: Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
P2TP2A	: Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
TKW	: Tenaga Kerja Wanita

Ringkasan Berita April 2014

Pengiriman pekerja anak ke luar negeri masih marak dilakukan di wilayah NTT, dan seringkali lolos dari pemantauan. Umumnya, peristiwa ini diketahui jika orangtua atau kerabat melapor pada aparat keamanan. Modusnya beragam dari pemalsuan identitas seperti Wilfrida Soik, hingga penculikan seperti yang dialami beberapa korban yang direkrut dari desa-desa.

DPO IRGSC edisi April 2014 meringkas 29 berita yang didominasi tiga tema: 1) Pemulangan para TKW korban tragedi Medan; 2) Perkembangan kasus Wilfrida Soik, TKW asal NTT yang diproses hukum di Pengadilan Malaysia karena membunuh majikannya; 3) Penggagalan pengiriman TKI ilegal dari NTT oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Setelah pada Bulan Maret para TKW korban tragedi Medan dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit, sebanyak 17 orang TKW dari total 24 TKW yang menjadi korban yang tercatat akhirnya dipulangkan ke NTT dari Rumah Aman Bambu Apus, Jakarta (No 23, 24) pada Bulan April 2014. Pemerintah Provinsi NTT menerima para TKW dan menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemda di kabupaten asal para korban untuk menyiapkan berbagai hal terkait jaminan kesehatan para korban, pendidikan bagi yang masih bersekolah, dan pemberdayaan ekonomi bagi para korban kekerasan (No 12). Sayangnya ucapan ini seperti penipuan, sebab pemerintah tidak siap mengirimkan korban yang nyaris tidak memiliki bekal di tangan.

“Kami tidak sekadar menerima untuk dipulangkan ke daerah asal, tetapi pemprov melalui Dinsos NTT sudah memiliki konsep menerima mereka. Supaya para korban kekerasan ini diberi pengarahan dan advokasi baik pada orang tua dan yang bersangkutan. Kami menjelaskan kepada mereka agar kalau ingin bekerja di luar NTT harus mengurus surat yang resmi. Harus ada pembinaan dulu di sini baru dipulangkan ke daerah masing-masing”

Yohana Lisapaly, Asisten I Sekda Provinsi NTT

Setelah 17 orang TKW korban tragedi Medan dipulangkan ke Kupang tepatnya pada tanggal 25 April 2014, sejumlah pihak menilai Pemerintah Provinsi tidak mempersiapkan dengan optimal pemulangan para TKW ini, bahkan terkesan setengah hati. Sekurangnya ada dua hal yang memunculkan penilaian tersebut. Pertama, para orang tua korban tidak difasilitasi oleh pemerintah provinsi untuk menemui anak-anak mereka

yang menjadi korban. Pertemuan para orang tua dengan anak-anak diinisiasi dan difasilitasi oleh Aliansi Menolak Perdagangan Orang (AMPERA) yang mengawal kasus tersebut sejak pertama kali terkuak (No 22).

“Hingga detik ini (kemarin), pemprov tidak mampu menghubungi keluarga korban. AMPERA juga yang membiayai orang tua mereka, karena pemprov beralasan tidak punya biaya”

Paul SinlaeloE, Divisi Pengaduan dan Pendampingan Kasus PIAR NTT

Alasan ketiadaan biaya Pemprov dikritisi dengan keras oleh anggota DPRD Provinsi NTT, Alex Kase, yang mengatakan bahwa alasan tersebut sangat tidak tepat mengingat kondisi para TKW yang begitu memprihatinkan. Pemprov dinilai seharusnya benar-benar bertanggungjawab dalam hal ini. Hal kedua yang memunculkan penilaian bahwa Pemprov tidak siap, adalah bahwa sebelumnya Pemprov NTT melalui Dinas Sosial telah merencanakan untuk menampung para TKW di Dinas Sosial (No 19). Namun pada waktu para TKW korban tragedi Medan ini tiba di Kupang, mereka tidak dibawa ke penampungan milik Dinas Sosial melainkan ditampung di sekretariat Jaringan Perempuan Indonesia Timur (J-PIT) di Lasiana (No 24).

Peraga 1. Alur Penanganan TKW korban Tragedi Medan¹



¹ Diolah dari DPO IRGSC bulan Maret 2014 dan berita no 23 dan 24

Selain 17 orang TKW yang dipulangkan ke NTT, sepanjang bulan April juga tidak dimuat pemberitaan tentang kondisi para TKW lainnya yang tengah dirawat di Rumah Sakit di Medan, dan 2 orang TKW yang menghilang. Tidak diberitakan pula lebih lanjut bagaimana rincinya penanganan atau koordinasi Pemprov dan Pemda pasca pemulangan para TKW ke kampung asalnya masing-masing. Berita tentang proses hukum terhadap Mohar, Hariati Ongkoh, dan Fina Winseli juga tidak diberitakan oleh media massa.

Sementara itu, di bulan April juga diberitakan perkembangan kasus Wilfrida Soik, TKW asal desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, yang membunuh majikannya Yeap Seok Pen, 7 Desember 2010 silam di Malaysia. Wilfrida dinyatakan bebas dari hukuman mati yang sebelumnya dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dan sempat dikabulkan oleh Mahkamah Tinggi Malaysia (No. 1, 6, 7, 8, dan 10). Pembebasan tersebut didasarkan pada dua alasan: 1) Wilfrida mengalami gangguan kejiwaan sementara akibat tekanan di luar batas kemampuannya; 2) *Intelligence Quotient* (IQ) yang rendah menyebabkan Wilfrida tidak bisa mengendalikan diri atau menyadari realitas di sekitar dan tidak paham atas tindakan yang membawa konsekuensi pelanggaran hukum. Meskipun dibebaskan dari hukuman mati, jaksa penuntut dalam kasus ini juga mengajukan banding atas putusan pembebasan tersebut.

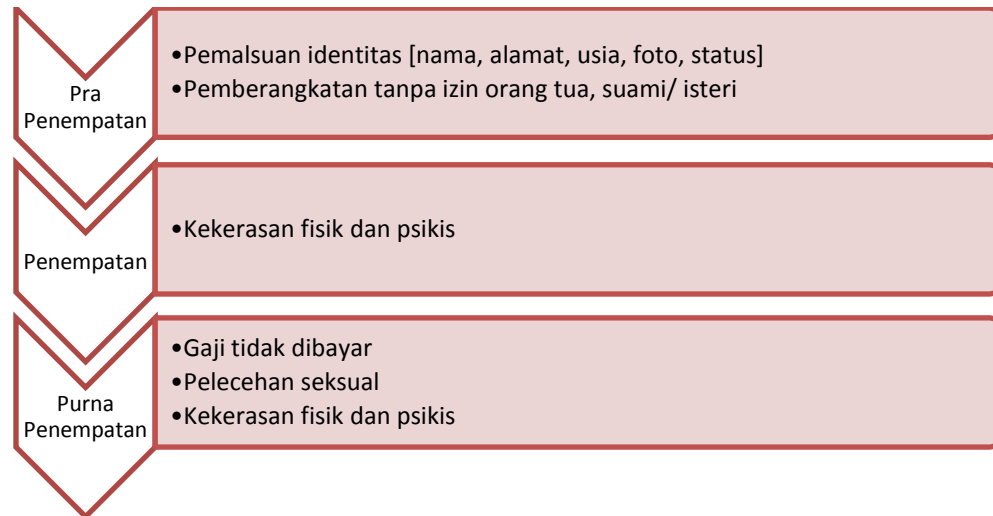
Selain berita tentang pemulangan para TKW korban tragedi Medan dan perkembangan kasus Wilfrida Soik, ada pula berita yang kurang mendapat porsi perhatian signifikan oleh media, yaitu berita terkait dengan penahanan GT, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Kupang, yang menjadi tersangka tindak pidana *trafficking* terhadap anak di bawah umur (No 4). Dari tiga media cetak di Kupang, hanya Pos Kupang yang meliput berita ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Kabupaten Kupang, GT, ditahan aparat Polres Kupang, Kamis (3/4/2014) sore. GT ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus perdagangan manusia (human trafficking).

Pos Kupang, Kadis Nakertrans Kupang Ditahan, 4 April 2014, Hal. 1

Penahanan GT sebagai salah satu pejabat pemerintah di NTT, menjadi bukti bahwa pemerintah NTT gagal memberikan perlindungan bagi warga NTT bahkan dengan sengaja membiarkan dan terlibat dalam memperdagangkan warga NTT yang seharusnya dilindungi. Provinsi NTT berdasarkan pantauan Kementerian Sosial RI hingga April 2014 menjadi provinsi kedua di Indonesia dengan jumlah kasus *trafficking* terbanyak. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian yang amat serius dari pemerintah dan berbagai pihak di NTT secara kolaboratif dan juga pihak di

luar NTT, karena praktek perdagangan orang dari NTT juga dilakukan di daerah di luar NTT. Di bulan April ini, selain kegagalan pengiriman TKI ilegal di Pelabuhan Tenau, sejumlah TKI ilegal asal NTT diamankan pihak Kepolisian di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Ny. Libby SinlaeloE dari lembaga Rumah Perempuan Kupang, potensi terjadinya praktek *trafficking* [dan perbudakan secara umum], ada dalam setiap tahapan migrasi tenaga kerja mulai dari pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan.



Peraga 2. Potensi terjadi Praktek *Trafficking* dalam Migrasi Tenaga Kerja

Sumber: Berita No 25.

Analisis Berita Media

Dari berita-berita tentang perdagangan orang yang dihimpun sepanjang bulan April 2014 ini, dapat diangkat dua hal penting sebagai berikut:

- Tidak ada pemberitaan tentang Mohar dan para TKW yang masih dirawat di RS**
 Sepanjang bulan April, tidak ada satu berita pun di surat kabar lokal NTT yang menelusur perkembangan proses hukum terhadap Mohar. Pemberitaan para jurnalis lebih banyak difokuskan pada pemulangan 17 orang TKW yang menjadi korban di Medan. Tidak adanya berita tentang Mohar ini sedikit banyak telah berpengaruh pada perhatian dan semangat masyarakat untuk memperjuangkan keadilan bagi

para korban dan masyarakat NTT pada umumnya. Yang dikhawatirkan dengan tidak adanya investigasi khusus terhadap proses hukum bagi Mohar, masyarakat NTT digiring kepada sikap berterima dan *powerless*, melupakan tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara-saudaranya. Sedangkan Mohar sendiri sebagai pelaku dibalik tragedi tersebut tidak tersentuh. Sepanjang bulan April juga tidak ada pemberitaan mengenai nasib para TKW yang masih dirawat di Rumah Sakit dan dua TKW yang masih menghilang. Penanganan dari Pemprov NTT dan *International Organization for Migration* (IOM) terhadap mereka juga tidak diketahui.

Daftar Perusahaan/Individu Yang Perlu Diawasi/ Dihukum

Dari berita-berita di bulan April ini, khususnya terkait dengan kegagalan pengiriman TKI ilegal asal NTT, berikut ini nama-nama perusahaan maupun individu yang mendapat pengawasan maupun hukuman:

1. Yohanes Tefa (No 2 dan 5)

- a. Profil Pelaku
 - i. Berumur 34 tahun, berasal dari Oinlasi, Kabupaten TTS
 - ii. Memiliki paspor Malaysia
- b. Pelanggaran: Yohanes Tefa diduga merekrut dan hendak memberangkatkan 16 orang TKI secara ilegal tanpa kelengkapan dokumen. Di antara 16 TKI tersebut, 1 orang TKI masih berusia 16 tahun
- c. Asal daerah Para TKI: Kabupaten Kupang 2 orang, Kabupaten TTS 5 orang, Kabupaten TTU 8 orang, dan Kabupaten Belu 1 orang. Satu orang dari Kabupaten TTS masih berusia 16 tahun atas nama Melki Tefa.
- d. Modus: Tidak diketahui
- e. Rute: Kupang → Maumere → Malaysia (Menggunakan KM Bukit Siguntang)
- f. Wilayah Hukum: Polda NTT

2. Imelda Lisu (No.3)

- a) TKW asal Desa Oelo, Kecamatan Musi, Kabupaten TTU dirawat di bangsal jiwa RSUD Prof.dr.WZ Johannes Kupang
- b) Mengalami depresi, dan dirawat di bangsal jiwa RSUD Prof.Dr.WZ Johannes, Kupang
- c) Nama agen tidak diketahui, dipulangkan dari Malaysia

3. Kadis Nakertrans Kab.Kupang (GT) (No.4)

- a. Ditahan sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang
- b. Wilayah Hukum: Kabupaten Kupang

4. Wilfrida Soik (No.6, 7, dan 8)

- a. Asal Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu
- b. Pengirim tidak tertulis dalam berita, tetapi jelas pengirimnya memalsukan usia Wilfrida.
- c. Diputuskan tidak bersalah oleh Pengadilan Kota Bharu (7 April 2014) karena masih di bawah umur, identitasnya dipalsukan dan ia dikategorikan mengalami *acute and transient psychotic disorder* oleh psikolog. Wilfrida didakwa membunuh majikannya Bulan Desember 2010.

5. CV San Marco, Jambi (No. 9, 16, dan 20)

- a. Profil
 - i. Merupakan sebuah perusahaan penyalur TKI ke luar negeri
 - ii. Pemilik: Vincentius Nari (41), dan staf: Servianus Resu (55)
 - iii. Memiliki kantor di Flores.
- b. Pelanggaran: (1) Mereka memberangkatkan 7 TKI secara ilegal tanpa dokumen apapun. (2) Dua CTKW masih anak-anak (dibawah 18 tahun), (3) tetapi tiga orang yang dikategorikan di bawah umur berdasarkan ketentuan pengiriman (di atas 21 tahun) yang diperbolehkan berangkat. Para TKI hendak diberangkatkan dengan **KM Dharma Kencana** dari Maumere. Mereka direkrut dari berbagai desa di beberapa kabupaten: Ende (2 orang), Ngada (1 orang), dan Nagekeo (4 orang).
- c. Catatan: Dalam skema mereka para majikan langsung membayar kepada para perekrut. Jumlah gaji dari majikan tidak diketahui, tetapi gaji dari CV San Marco kepada para CTKI ini sebesar 800 ribu per bulan, dan dua bulan gaji mereka akan dipotong untuk membayar biaya transportasi.
- d. Identitas CTKW ilegal: (1.)Kartini Daso (34) asal Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo; (2.) Kristina Jelsiana Muku (17), asal Nanganumba, Desa Nggoloni, Kecamatan Aesesa, Kab.Nagekeo; (3) Endang Satrianingsih (22), Asal Desa Tonggurambang, Kec.Aesesa, Kabupaten Nagekeo, (4) Supiati (17), Watubhara, Kec.Wewaria, Kab. Ende; (5) Maria Goreti Mau (33), Boanage, Kecamatan Boawae, Kab.Nagekeo, (6) Lis Dewi Muliati (40), asal Dusun Poe Kabupaten Ngada, (7) Jelinrensiana Daso (20) asal Kota Keo, Kecamatan Nangaroro, Kab.Ende.

Lima CTKI dari Ngada dan Nagekeo dipulangkan oleh Pemda Kabupaten Nagekeo, setelah selama dua minggu menginap di Polda Jawa Timur.
- e. Rute: Ende, Nagekeo, Ngada (jalan darat)-----→Maumere (KM Dharma Kencana)→ Surabaya → **Jambi**→ Malaysia

Mereka rencananya akan menumpang kapal lanjutan ke Jambi, dan akan ditampung di sana sebelum diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal laut.²

- f. Wilayah Hukum: Para TKI dan perekrutnya ditangkap di **Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya** sehingga menjadi wilayah hukum Polres Tanjung Perak Surabaya, Polda Jawa Timur. Orangtua anak-anak melaporkan penculikan anak ini ke Polresta Kab.Sikka yang langsung menghubungi pihak kepolisian Polda Jawa Timur.³ Dengan koordinasi yang baik, kedua pelaku dijerat dengan UU No.21/2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 ayat 1 dan 2) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

6. Evelina Anunut (No 28)⁴

- a. Profil
 - i. Evelina merupakan pemilik rumah tempat penampungan TKI yang digerebek oleh polisi, dan mengamankan 49 TKI di dalamnya.
 - ii. Nama PPTKIS tidak diketahui
 - iii. Beralamat di RT 26/ RW 07, Kelurahan Tuak daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- b. Dugaan pelanggaran: Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dan hendak memberangkatkan 3 orang TKI yang diketahui sedang dalam keadaan hamil.
- c. Rute: Kupang → Kalimantan → [dugaan] luar negeri
- d. Wilayah Hukum: Polda NTT
- e. Catatan: Tidak ada berita tentang penanganan selanjutnya terhadap 49 TKI yang diamankan dari rumah itu

Daftar Instansi Publik/ Pemerintahan Yang Perlu Diawasi

Selain perusahaan dan individu, berikut ini adalah daftar instansi publik atau pemerintahan yang juga perlu diawasi:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Kupang.

² <http://www.indopos.co.id/2014/04/7-tki-ilegal-gagal-dikirim.html> [Diakses tanggal 5 Januari 2015]

³ <http://news.detik.com/read/2014/04/21/181111/2561198/475> [Diakses tanggal 5 Januari 2015]

⁴ <http://sp.beritasatu.com/home/puluhan-calon-tkw-yang-hamil-disembunyikan-di-gua-di-ntt/54959> [Diakses 5 Januari 2015]

Di bulan April ini, Polres Kupang telah menahan GT, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kupang yang setelah melalui pemeriksaan, ternyata dengan bukti yang kuat telah terlibat dalam praktek perdagangan orang khususnya anak di bawah umur. Pengawasan perlu diberikan pada instansi ini, karena bisa saja ada pula oknum-oknum di dalam instansi tersebut yang terlibat hal yang sama.

2. Dinas Sosial Provinsi NTT

Dinas Sosial provinsi NTT telah menyatakan bahwa para TKW korban tragedi Medan akan ditampung di tempat penampungan milik Dinas Sosial, namun pada kenyataannya para TKW ketika dipulangkan ditampung di sekretariat J-PIT. Ketidaksesuaian konsep/gagasan dan implementasi pada tubuh Dinas Sosial membutuhkan pengawasan lebih agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

3. Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah asal korban Tragedi Medan

Melalui Asisten I Sekda Provinsi NTT, Yohana Lisapaly, Pemerintah provinsi NTT akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dari tempat asal para korban tragedi Medan untuk menyiapkan berbagai hal seperti penjaminan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi para korban. Hal yang mana perlu diawasi oleh masyarakat agar benar-benar direalisasikan.

4. Pengelola Pelabuhan Tenau Kupang

Di bulan April terjadi pula kegagalan pengiriman TKI yang diduga ilegal dari Pelabuhan Tenau Kupang, yang akan diberangkatkan dengan KM Bukit Siguntang. Pengawasan secara ketat di lokasi transportasi ini perlu terus dilakukan.

5. Pengelola Pelabuhan di Maumere

Selain Pelabuhan Tenau Kupang, beberapa TKI ilegal juga telah diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Para TKI itu diberangkatkan dengan KM Dharma Kencana dari Maumere. Pelabuhan di Maumere karenanya perlu mendapat pengawasan yang lebih agar di waktu-waktu mendatang pemberangkatan TKI secara ilegal tidak lagi terjadi.

Ringkasan Berita Surat kabar

NO	Tanggal	Judul	Ringkasan Berita
1	Selasa, 1 April 2014	Tuntutan terhadap Wilfrida Dikabulkan (VN, hal 10)	<p>Tuntutan hukuman mati terhadap TKW asal Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu Wilfrida Soik karena membunuh majikannya dikabulkan hakim dalam sidang lanjutan kasusnya di Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, Minggu (30/3). Akan tetapi Wilfrida diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang akan digelar pada hari ini hingga Kamis (3/4).</p> <p>Demikian isi <i>press release</i> dari KBRI Malaysia yang diterima VN, Senin (31/3).</p> <p>Dalam release tersebut dinyatakan, perkembangan sidang kasus Wilfrida Soik sudah digelar Minggu (30/3). Inti penting dari sidang tersebut hakim menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhasil meyakinkan Mahkamah dan menyatakan <i>prima facie</i> atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh WS terhadap majikannya bernama Yeap Seok Pen pada 7 Desember 2010 lalu.</p> <p>Dengan dinyatakan <i>prima facie</i> berarti hakim meyakini bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti serta kasaksian yang diajukan jaksa pada tahap dakwaan menunjukkan terjadi tindak pidana yang menuntut Wilfrida dihukum mati. Selanjutnya hakim meminta Wilfrida untuk melakukan pembelaan diri.</p>
2	Kamis, 3 April 2014	KP3 Laut Tenau Tangkap 16 TKI Ilegal (VN, hal 9)	<p>Polisi dari Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Laut Tenau, Kupang kembali menangkap 16 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tujuan Malaysia, Jumat (28/3) sekitar pukul 13.00 Wita. Para TKI ini akan diberangkatkan dengan Kapal Motor Bukit Siguntang itu terdiri dari 14 orang pria dan 2 orang perempuan.</p> <p>Demikian disampaikan Wakil Kapolres Kupang Kota Kopol Yulian Perdana melalui emailnya kepada VN, Rabu (2/4). Dia menjelaskan, selain 16 TKI itu ditangkap pula oknum perekrutnya atas nama Yohanes Tefa (34), asal Oinlasi Kabupaten TTS yang memiliki paspor tujuan Malaysia. Ke-16 TKI itu berasal dari Kabupaten Kupang 2 orang, Kabupaten TTS 5 orang, Kabupaten TTU 8 orang, dan kabupaten Belu 1 orang. Satu orang di antara mereka atas nama Melki Tefa masih berumur 16 tahun," ujarnya.</p>
3	Kamis, 3 April	RSUD Rawat TKW yang Depresi karena Dianiaya	<p>Imelda Lisu (28), tenaga kerja wanita (TKW) asal Oeolo, Desa Oeole, Kecamatan Musi, Kabupaten TTU mengalami depresi akibat dianiaya majikan saat bekerja di Malaysia. Hingga kini, korban masih dalam perawatan intensif di bangsal Jiwa RSUD Prof. Dr. WZ Johannes</p>

	2014	(VN, hal 15)	<p>Kupang.</p> <p>Demikian dikatakan dr. Dikson Legoh, ahli penyakit jiwa kepada VN, Rabu (2/4). Dia mengatakan, pasien mengalami depresi dan sudah menjalani perawatan selama seminggu. Dia diantar orangtuanya dalam keadaan depresi. Ia sering bicara sembarangan. Saat ini, ia masih dirawat intensif dan sudah mulai membaik. Hanya saja, dia belum memastikan penyebab depresi, karena korban masih labil saat diajak komunikasi.</p> <p>Marcelina Kabu, orangtua Imelda mengaku tidak terima anaknya depresi. Dia menuntut agar agen yang mempekerjakan anaknya ke Malaysia bertanggung jawab. "Saya dapat telepon dari temannya yang di Malaysia bahwa anak saya sakit jiwa dan sudah dalam perjalanan pulang ke Kupang bersama 14 teman lainnya," katanya.</p>
4	Senin, 4 April 2014	Kadis Nakertrans Kupang Ditahan (PK, hal 1)	<p>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Kabupaten Kupang, GT, ditahan aparat Polres Kupang, Kamis (3/4/2014) sore. GT ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>). GT sudah dijebloskan ke dalam sel Markas Polres Kupang, Kamis (3/4/2014) sore, karena polisi menemukan bukti awal yang kuat tentang keterlibatan GT.</p> <p>Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kupang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs. Dominicus Savio Yepormanse, yang dikonfirmasi, Kamis (3/4/2014) malam, membenarkan penahanan GT.</p> <p>"Benar itu. Dia kami tahan karena diduga kuat terlibat dalam kasus <i>human trafficking</i> anak di bawah umur setahun yang lalu," jelas Dominicus melalui telepon genggamnya.</p>
5	Jumat, 04 April 2014	16 Canaker Ilegal Diamankan (TE, hal 12)	<p>Belasan pencari kerja asal empat kabupaten di daratan Timor itu, diamankan saat hendak diberangkatkan menggunakan KM Bukit Siguntang di Pelabuhan Tanjung Lontar, Tenau, Jumat (28/3) sekira pukul 13.00 Wita.</p> <p>Wakapolres Kupang Kota, Kompol Yulian Perdana, saat dikonfirmasi Selasa (2/4), mengatakan para canaker yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan dua orang perempuan itu, diamankan saat pihak KP3 Laut melaksanakan patroli. "Ada satu orang yang masih di bawah umur, yaitu Melki Tefa (16) asal Soe, Kabupaten TTS," kata Yulian.</p> <p>Mantan Waka Polres TTU itu menjelaskan, canaker ilegal yang diamankan berasal dari Kabupaten Kupang (2 orang) TTS (5 orang), TTU (8 orang), dan Kabupaten Belu (1 orang). Selain itu, petugas KP3 Laut Tenau juga mengamankan oknum perekrut bernama Yohanes Tefa (34), warga Oenlasi, Kabupaten TTS yang memiliki paspor tujuan Malaysia, dan membeli</p>

			tiket dengan modus Kupang-Maumere, dan nantinya akan terus ke Malaysia.
6	Selasa, 8 April 2014	Wilfrida Menangis Divonis Bebas (PK, hal 1)	<p>Haru bahagia terpancar di raut muka Wilfrida Soik (WS). Ia di putuskan tidak bersalah, lolos dari jeratan hukuman mati oleh Pengadilan Kota Bharu, Kelantan Malaysia, Senin, 7 April 2014. Majelis hakim memustuskan bahwa usia Wilfrida dinyatakan dibawah umur pada saat kejadian.</p> <p>“Tim ahli terkait dari RS Permai menyatakan WS mempunyai kecenderungan <i>“Acute Transcencychotic disorders</i>. WS juga dinyatakan punya kemampuan berpikir yang rendah, dan tidak bisa membuat keputusan sehingga Mahmakamah menyatakan WS tidak bersalah,” kata Politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.</p> <p>Rieke memastikan, meski sudah diputus bebas oleh majelis hakim, namun masih ada waktu empat belas hari bagi jaksa penuntut untuk mengajukan banding. “Semoga jaksa tak mengajukan banding atas putusan mejelis hakim yang memutus bebas,”kata Rieke</p>
7	Selasa, 08 April 2014	Wilfrida Bebas hukuman Mati (TE, hal 1)	<p>Vonis hakim itu mempertimbangkan bahwa Wilfrida mengalami gangguan kejiwaan saat pembunuhan itu terjadi. Sebagai ganti ancaman mati, hakim memerintahkan Wilfrida dirawat di rumah sakit jiwa hingga mendapatkan ampunan dari Sultan Kelantan. Setelah ampunan itu keluar, Wilfrida bisa dipulangkan ke tanah air. "Karenanya harus dikirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Sultan," kata Sekretaris bidang Informasi, Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Nurul Dewi Saraswati melalui siaran persnya kemarin.</p> <p>Hakim ternyata mempertimbangkan bukti-bukti bahwa TKI asal Belu, NTT itu mengalami gangguan kejiwaan sementara.</p> <p>Gangguan kejiwaan itu disebabkan adanya tekanan di luar batas kemampuan Wilfrida atau disebut <i>acute and transient psychotic disorder</i>. Selain itu faktor <i>Intelligence Quotien (IQ)</i> Wilfrida yang rendah menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan diri atau menyadari realitas di sekitar dan tidak paham atas tindakan yang membawa konsekuensi pelanggaran hukum.</p> <p>Dalam keterangan tertulis KBRI Kuala Lumpur diterangkan bahwa, hakim juga berpendapat tim pengacara KBRI berhasil membuktikan usia Wilfrida saat kejadian belum genap 18 tahun. Waktu kejadian pembunuhan itu, Wilfrida baru berumur 17 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Pidana Malaysia, maka Wilfrida tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi harus disidang berdasarkan Undang Anak-Anak.</p>

8	Selasa, 8 April 2014	Wilfrida Divonis Bebas Dari Hukuman Mati (VN, hal 9)	<p>Tenaga kerja wanita (TKW) asal desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu Wilfrida Soik divonis bebas oleh hakim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tinggi Kota Bharu Kelantan Malaysia, Senin (7/4). Wilfrida dinyatakan tidak bersalah oleh hakim Mahkamah Tinggi Kota Bharu dato' Azmad Zaidi bin Ibrahim dalam Kasus pembunuhan terhadap majikannya Desember 2010 lalu.</p> <p>Putusan ini berdasarkan pembuktian yang meyakinkan oleh kuasa hukum Wilfrida yang menyatakan bahwa Wilfrida mengalami gangguan kejiwaan saat pembunuhan terjadi. Selain itu kuasa hukum juga membuktikan bahwa Wilfrida belum genap umur 18 tahun pada saat kejadian, yang mana sesuai undang-undang pidana Malaysia Wilfrida tidak dapat dijatuhi hukuman mati.</p> <p>Demikian diungkapkan pihak KBRI Malaysia dalam <i>Press release</i> yang diterima VN, Senin (7/4).</p>
9	Selasa, 08 April 2014	Polisi Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal Asal NTT (TE, hal 1)	<p>Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri berhasil digagalkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi mengamankan dua tersangka dan tujuh korban. Dua diantaranya masih dibawah umur. Mereka akan dikirim ke luar negeri tanpa secuil dokumen apa pun.</p> <p>Kedua tersangka adalah Vincentius Nari, (41) warga Waipukang-NTT, dan Servianus Resu, (55), warga Sungai Putri, Telanaipura, Jambi. Vincentius adalah pemilik sekaligus bos CV San Marco. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyalur TKI ke luar negeri yang berkantor di NTT.</p> <p>Sedangkan ke tujuh korbannya adalah KR (17), Nanga Numba-NTT, SP (17) Watubara-NTT, ESN (18), Tonggu Rambang-NTT, JRD (20), Keo-NTT, MGM (33) Boanage-NTT, KRT (32) Tonggu Rambang-NTT, dan LDM (40) Pore-NTT.</p> <p>Mereka ditangkap di dermaga Pelabuhan Tanjung Perak 5 April lalu saat kapal Dharma Kencana yang bertolak dari Maumere, NTT, itu bersandar di Surabaya. "Kami dapat laporan dari NTT kalau ada penumpang kapal yang mau diselundupkan ke luar negeri," kata Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Perak, AKP Lily Djafar kemarin (22/4).</p>
10	Kamis, 10 April 2014	NTT Apresiasi Pembebasan Wilfrida (VN, hal 10)	<p>Publik Nusa Tenggara Timur diantaranya legislator, kaukus Perempuan, pengacara, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mengapresiasi putusan Pengadilan Malaysia membebaskan TKW asal Faturika, Kabupaten Belu Wilfrida Soik dari hukuman mati dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu.</p> <p>"Puji Tuhan Wilfrida bebas dari tuntutan hukuman mati tanpa syarat kami baru saja</p>

			menerima pesan singkat langsung dari keluarga terpidana yang tengah mengikuti sidang putusan di Mahkamah Tinggi, Kota Bharu Kalantan, Malaysia, Senin," kata Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi NTT Ana Waha Kolin di Kupang, beberapa waktu lalu.
11	Sabtu, 12 April 2014	Pemimpin Tegas Untuk Atasi Human Trafficking (VN, hal 3)	<p>Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan kasus penjualan manusia (<i>human trafficking</i>), butuh pemimpin yang tegas dan komit. Jika tidak, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap perempuan tidak akan mengalami penurunan.</p> <p>Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemulangan 17 Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Jakarta ke NTT di ruang rapat Asisten I Setda NTT, Jumat (11/4). 17 TKW yang akan dipulangkan ini merupakan TKW yang diduga direkrut secara ilegal dan mengalami masalah di Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.</p>
12	Minggu, 13 April 2014	NTT Terima Korban Kekerasan Medan (PK, hal 6)	<p>Pemerintah Propinsi (Pemprov) NTT siap menerima pemulangan 17 korban kekerasan dari perusahaan walet di Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/4/2014). Namun, sebelumnya pemprov akan berkoordinasi dengan pemda kabupaten asal para korban kekerasan tersebut.</p> <p>Hal ini dilakukan agar pemda kabupaten bisa menyiapkan berbagai hal terkait persoalan korban kekerasan seperti, jaminan kesehatan, pendidikan bagi yang masih bersekolah, dan pemberdayaan ekonomi bagi para korban kekerasan. Hal ini disampaikan Asisten I Sekda Propinsi NTT, Yohana Lisapaly, didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi NTT, Erni Usboko, saat pertemuan koordinasi di ruang kerjanya, Jumat (11/4/2014).</p> <p>Hadir saat itu, Direktur Direktorat Korban Bina Kekerasan dan Buruh Migran Kementerian Sosial RI, Aktiva Elamsari, Direktur Tindak Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, I'in Emy, <i>International Organization Migration (IOM)</i>, Nurul, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan unsur terkait lainnya.</p> <p>Lisapaly, mengatakan, pemprop pada dasarnya sudah siap menerima pemulangan korban kekerasan, yang rencananya hari ini Jumat, 11 April 2014, tetapi ditunda tanggal 25 April 2014. "Kami tidak sekadar menerima untuk dipulangkan ke daerah asal, tetapi pemprov melalui Dinsos NTT sudah memiliki konsep menerima mereka. Supaya para korban kekerasan ini diberi pengarahan dan advokasi baik pada orang tua dan yang bersangkutan. Kami menjelaskan kepada mereka agar kalau ingin bekerja di luar NTT harus mengurus surat yang resmi. Harus ada pembinaan dulu di sini baru dipulangkan ke daerah masing-masing," ujar</p>

			Lisapaly.
13	Minggu, 13 April 2014	NTT Tertinggi Soal <i>Trafficking</i> (PK, hal 6)	<p>Direktorat Korban Bina Kekerasan dan Migran Kementerian Sosial, Aktiva Elamsari, mengatakan, kasus TKW yang terjadi di Medan, merupakan bagian terkecil yang terkuak selama ini. Dari jumlah kasus <i>trafficking</i>, NTT berada pada peringkat dua secara nasional. Menurutnya, data-data tersebut ada di kementerian sosial. Ia mengatakan, peningkatan perbudakan manusia karena tidak ada keseriusan dari Pemprop NTT untuk mengatasi masalah.</p> <p>"Jangan-jangan pemerintah tidak memiliki data soal <i>trafficking</i>. Masalah ini terus muncul apabila pemerintah tidak serius menanganinya," katanya.</p> <p>Ia mengatakan, <i>trafficking</i> yang terjadi tidak hanya dilakukan para calo, tetapi pemerintah justru ikut meraup keuntungan. Terkait penanganan korban kekerasan, ia mengatakan, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran ekonomi produktif Rp. 3 juta per orang. Dana tersebut, katanya, digunakan untuk pelatihan dan pembekalan, agar bisa memiliki keterampilan. Dana tersebut, katanya. Masuk langsung ke rekening yang bersangkutan.</p>
14	Minggu, 13 April 2014	Pelajaran Berharga Dari Wilfrida Soik (VN, hal 3)	<p>Senin (7/4) merupakan hari bersejarah yang patut dicatat semua orang NTT. Hari itu merupakan hari pembebasan bagi tenaga kerja wanita (TKW) asal desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dari hukuman mati di Pengadilan Tinggi Kalantan, Malaysia. Meski masih menunggu gugatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetapi sudah da secercah harapan bagi pemasok devisa untuk bebas dari hukuman mati.</p> <p>Pengalaman Wilfrida bukanlah yang terakhir. Masih ada 176 WNI yang terancam hukuman mati karena terlibat berbagai tindak pidana, umum pidana narkoba. Saat ini, mereka masih didampingi oleh KBRI untuk memperjuangkan pembebasan mereka.</p>
15	Minggu, 13 April 2014	Tuntaskan Kasus TKI di NTT (VN, hal 3)	<p>Anggota DPD RI Sarah Lerry Mboeik yang getol mengamati dan mendampingi korban kasus-kasus TKI, ketika dimintai komentarnya terkait berbagai kasus TKI ini mengatakan, persoalan mendasar tidak tuntasnya kasus-kasus TKI ini ada ditangan polisi. Polisi, menurutnya tidak mampu menyelesaikan proses hukum tersebut. "Polisi memproses hukum kasus ini tetapi buktinya tidak selesai. Kalau memang tidak mapu menyelesaikannya Kapoldanya diganti," tegasnya.</p> <p>Selain itu menurut dia, kasus ini terjadi karena kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untk tidak menjadi korban penjualan manusia. "Kan ada oknum-oknum di Pemerintahan seperti dinas penduduk, transmigrasi, bahkan para</p>

			<p>kepala desa yang ikut bermain demi menerbitkan KTP dan berkas lainnya untuk meloloskan bisnis manusia ini.” Jelasnya.</p> <p>Karena itu, kata dia untuk meminimalisir kasus-kasus serupa pada tahun 2014, pemerintah maupun penegak hukum harus tegas menindak dan memberi efek jera kepada perusahaan Jasa TKI yang ada di NTT. Pertama-tama menurut dia, tutup semua perusahaan PJTKI di NTT.</p>
16	Kamis, 17 April 2014	Penyelundupan TKW Nagekeo Digagalkan (PK, hal 20)	<p>Polres Tanjung Perak Surabaya menggagalkan penyelundupan tujuh TKW asal Nagekeo ke Kalimantan. Tujuh TKW asal Nagekeo itu kini dititipkan di Mapolda Jawa Timur. Sementara dua tenaga lapangan yang merekrut para TKW telah ditahan di Polda Jatim.</p> <p>Tujuh TKW yang ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 5 April lalu yakni Kartini Daso (34) asal Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa; Kristina Jelsiana Muku, asal Nanganumba, Desa Nggoloni, Kecamatan Aesesa; Endang satrianingsih (22), Asal Desa Tonggurambang Supiati wataubhara, Wewaria Ende; Maria Goreti Mau, Boanage, Kecamatan Boawae, Lis Dewi Muliati (40), asal Dusun Poe Kabupaten Ngada, Jelinrensiana Daso (20) asal Kota Keo, Kecamatan Nangaroro.</p> <p>Kapolsek Aesesa, Kompol TS Paulina yang ditemui di kediamannya, Selasa (15/4/2014), membenarkan informasi tersebut. Paulina mengatakan, ketujuh TKW ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama dua orang staf CV Sanmarko Jambi yang merekrut para TKW tersebut. Penangkapan para TKW, kata Paulina, berawal dari laporan orangtua salah satu TKW asal Tonggurambang ke Polsek Tanjung Perak, Surabaya.</p>
17	Senin, 21 April 2014	TKW Penyekapan di Medan Dibina Kemensos (VN, hal 9)	<p>Sebanyak 15 orang tenaga kerja asal NTT, korban penyekapan oleh majikannya di Medan, Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini belum pulang ke kampung halamannya. Mereka masih dibina di Kementerian Sosial, selain untuk memulihkan tekanan psikologis, mereka juga dilatih berbagai keahlian untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.</p> <p>Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumut M Zahrin Piliang mengatakan, 15 wanita remaja asal Kupang, Provinsi NTT yang menjadi korban penyekapan oleh majikannya di Medan kini dibina jajaran Kementerian Sosial.</p> <p>“Wanita korban perdagangan tersebut sempat dirawat selama beberapa hari di RSUD dr. Pirngadi Medan dan juga dititipkan di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumut,” katanya di Medan, Sabtu (19/4).</p>
18	Rabu, 23 April	Tujuh TKW Ilegal Asal NTT Ditangkap di Surabaya	<p>Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri berhasil digagalkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi mengamankan dua tersangka dan tujuh korban.</p>

	2014	(VN, hal 9)	<p>Dua diantaranya masih dibawah umur.</p> <p>Kedua tersangka itu adalah Vincentius Nari (41) warga Waipukang, Kabupaten Lembata yang juga pemilik sekaligus bos CV San Marco. Tersangka lainnya adalah Servianus Resu (55), warga Sungai Putri, Telanaipura, Jambi. CV San Marco merupakan perusahaan penyalur TKI ke luar negeri yang berkantor di Flores NTT. Sedangkan ketujuh korbannya adalah KR (17) asal Nanga Numba, Ende, SP (17) asal Watubara, ASN (18) asal Tonggu Ramba, Ende, JRD (20) asal Keo, Nagekeo, MGM (33) asal Boanage, Nagekeo, KRT (32) asal Tonggu Ramba, Ende, dan LDM (40) asal Pore. Mereka ditangkap di dermaga Pelabuhan Tanjung Perak 5 April lalu saat kapal Dharma Kencana yang bertolak dari Maumere, itu bersandar di Surabaya.</p>
19	Kamis, 24 April 2014	Besok Korban <i>Trafficking</i> Medan Akan Dipulangkan (VN, hal 9)	<p>Sebanyak 15 orang tenaga kerja asal NTT yang menjadi korban <i>trafficking</i>, penangkapan, dan penyiksaan dari majikannya di Medan, Sumatera Utara akan dipulangkan, Jumat (25/4). Para TKW yang disekap Mohar, seorang pengusaha sarang burung walet sesuai rencana dipulangkan ke NTT oleh <i>Internasional Organization for Migration (IOM)</i>. Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Willem Foni Kepada VN, Rabu (23/4).</p> <p>Dia mengatakan, para korban akan dipulangkan melalui Bambu Apus, Jakarta. Untuk menyambut para TKW ini, pihaknya telah melakukan rapat dengan Asisten I Yohana Lisapally dan telah menyepakatinya untuk ditampung Dinas Sosial.</p>
20	Jumat, 25 April 2014	Lima Calon TKW Segera Dipulangkan (PK, hal 20)	<p>Lima dari tujuh calon tenaga kerja wanita (TKW) asal Nagekeo yang ditangkap aparat Kepolisian Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur (Jatim), akan dipulangkan dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menyiapkan anggaran untuk menjemput lima TKW tersebut dari Surabaya.</p> <p>Demikian disampaikan Bupati Nagekeo, Elias Djo ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (23/4/2014). Elias mengatakan, telah memerintahkan Dinas Sosial dan Nakertrans untuk memulangkan lima TKW asal Nagekeo yang selama hampir dua minggu dititipkan di Polda Jatim tersebut. "Saya sudah minta Bagian Keuangan siapkan anggaran untuk jemput lima calon TKW asal Nagekeo yang ditangkap di Tanjung Perak Surabaya awal april lalu," kata Elias.</p> <p>Lima calon TKW yang ditahan di Polda Jatim yakni Karsini Daro (34) asal Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Endang Satrianigsih (22) juga dari Desa Tonggurambang, Jeling Rensiana Daso (20) asal Kecamatan Nangaroro, Maria Goreti Mau (33) asal Boawae dan Kristina Yestiana Muku (16) dari Desa Nggolonio, Kecamatan Aesesa.</p>

21	Jumat, 25 April 2014	Jaksa Banding, Wilfrida Terancam Dipenjara Lagi (VN, hal 9)	<p>Kabar kebebasan TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilfrida Soik nampaknya belum bisa dinikmati. Setelah diputuskan bebas dalam sidang Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Malaysia (7/4) lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Kelantan, Malaysia mengajukan banding atas kasus tersebut.</p> <p>Wilfrida sebelumnya divonis bebas setelah didakwa membunuh orangtua dari majikannya di Malaysia.</p> <p>Ketua Satgas Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indoensia (WNI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia Dino Wahyudin mengatakan bahwa upaya banding telah diajukan oleh jaksa kepada pengadilan setempat pekan lalu.</p> <p>Alasannya, Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan hasil putusan hakim sebelumnya yang menyatakan kondisi kejiwaan Wilfrida terganggu saat melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Sehingga Wilfrida divonis bebas dari hukuman mati.</p> <p>"Keputusan kemarin sudah kuat namun mereka banding lagi, kita sudah menyiapkan semuanya untuk menghadapi gugatan banding," kata Dino Wahyudin kepada KBR68H, Rabu (23/4) hari ini.</p>
22	Jumat, 25 April 2014	Pemprov Dinilai Tidak Siap Sambut TKW Medan (VN, hal 9)	<p>Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dinilai tidak siap menyambut pemulangan para TKW, korban penyekapan di Medan Sumatera Utara. Pasalnya, hingga kemarin belum ada inisiatif dari pemerintah untuk mengabarkan pemulangan para TKW tersebut kepada orang tua mereka di kampung halamannya. Yang berinisiatif menghubungi keluarga korban justru Aliansi Melawan Perdagangan Orang (AMPERA).</p> <p>Kepala Bidang Pengaduan dan Pendampingan Kasus PIAR NTT Paul SinlaEloE kepada V, Kamis (24/4) mengatakan pemprov sangat tidak siap menyambut pemulangan 15 TKW itu. "Hingga detik ini (kemarin), pemprov tidak mampu menghubungi keluarga korban. AMPERA juga yang membiayai orang tua mereka, karena pemprov beralasan tidak punya biaya," tandas Paul.</p> <p>Disamping itu, menurutnya, Dinas Sosial dari kabupaten-kabupaten yang bersangkutan tidak mampu dihadirkan. Hal ini memberikan kesan bahwa pemprov gagal melakukan koordinasi. "Pemprov jauh lebih siap dalam menyambut jenazah korban TKI yang meninggal disertai dengan krans bunga, dibandingkan dengan menjemput para korban yang masih hidup," tegasnya.</p>
23	Sabtu, 26 April	Korban <i>Trafficking</i> Medan Tiba di Kupang (PK, hal 11)	<p>Sebanyak 17 TKW asal NTT yang menjadi korban <i>trafficking</i> di Medan, Sumatera Utara, tiba di Kupang, Jumat (25/4/2014). Isak tangis keluarga para korban mewarnai pertemuan itu sejak</p>

	2014		<p>dari Bandara El Tari, Kupang.</p> <p>Keluarga korban telah menunggu kedatangan para TKW ini di bandara sejak pukul 13.30 Wita. Mereka sempat khawatir karena informasi pemulangan anak anak mereka masih simpang siur. Beberapa anggota keluarga nampak sangat marah karena sudah menunggu lebih dari satu jam namun belum bisa melihat para TKW tersebut. Namun semua kekhawatiran mereka terhapuskan ketika melihat anak mereka muncul dengan menumpang bus milik Dinas Sosial Provinsi NTT.</p> <p>Suasana menjadi sangat dramatis ketika keluarga korban <i>trafficking</i> hanya bisa melihat anak mereka yang berada di dalam bus. Mereka hanya bisa meneriaki anak mereka, karena tak diperbolehkan naik ke bus. Para korban <i>trafficking</i> pun tak mampu menahan air mata mereka saat melihat keluarganya. Mereka mencoba untuk keluarga dari bus namun ditahan oleh beberapa petugas.</p> <p>Para korban <i>trafficking</i> ini tiba di Kupang menumpang pesawat Lion Air dan tiba di bandara sekitar pukul 15.00 Wita. Dari bandara, dengan menumpang bus, 17 TKW ini langsung dibawa ke Mapolda, Keluarga korban pun menuju Polda NTT dengan menumpang beberapa mobil yang telah disediakan oleh pihak fasilitator pemulangan korban <i>trafficking</i>.</p>
24	Sabtu, 26 April 2014	Pertentangan Warnai Penyambutan TKW Medan (VN, hal 10)	<p>Para Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT yang menjadi korban pengeksploitasian majikannya di Medan, Sumatera Utara sudah tiba di Kupang, jumat (25/4) dan saat ini ditampung di Sekretariat Aliansi melawan Perdagangan Orang (Ampera) di Kantor J-PIT Lasiana, Kupang. Sebanyak 17 korban yang tiba dengan pesawat Lion Air sekitar 15.00 Wita tersebut disambut isak tangis dari keluarga korban dan diwarnai pertentangan.</p> <p>Penyambutan para TKW di Bandara El Tari Kupang diwarnai pertentangan antara keluarga korban dan Pihak AMPERA dengan IOM dan Pemerintah Provinsi NTT. Pasalnya, para orangtua yang sudah difasilitasi Ampera dilarang untuk menemui para korban, Bukan hanya itu, di saat pertemuan tertutup dengan Kapolda pun Ampera dilarang untuk masuk.</p>
25	Senin, 28 April 2014	Pemangku Kepentingan Harus Temukan Solusi (TE, hal 11)	<p>Mengantisipasi maraknya kasus <i>trafficking</i> yang terjadi di NTT saat ini, maka pemangku kepentingan terus mencari solusi guna mengatasi hal itu. Rabu (23/4) Lembaga Rumah Perempuan Kupang, didukung oleh ACT menggelar diskusi, dengan menghadirkan perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Biro Hukum, Kepolisian Daerah yang dihadiri Direskrim, P2TP2A, Ampera, LBH Apik, JPIT, dan PIAR. Diskusi tersebut dilaksanakan di Kantor Rumah Perempuan Kupang.</p>

			<p>Direksi Rumah Perempuan Kupang, Libby Sinlaeloe dalam diskusi itu mengatakan, persoalan atau kasus <i>trafficking</i> yang kian marak di NTT, dipengaruhi oleh tiga faktor yakni pra penempatan dimana adanya pemalsuan nama, alamat, usia, foto (foto orang lain), status, tidak ada izin dari orangtua, istri, suami, dan untuk penempatan orang ditempatkan sering mengalami kekerasan,”katanya.</p> <p>Sementara untuk purna penempatan, lanjut Libby, persoalan yang terjadi terhadap tenaga kerja diantaranya, gaji tidak dibayar, cek kosong, hamil, penganiayaan dan kekerasan baik fisik maupun psikis. Untuk itu, perlu diambil langkah atau solusi, guna penanganan setiap kasus trafficking di daerah ini. Dilanjutkan, NTT merupakan salah satu sending area di Indonesia. Secara administratif banyak buruh migran bermasalah berusia dewasa, namun faktanya mereka masih berusia anak.</p> <p>Penanganan kasus <i>trafficking</i> oleh Lembaga Rumah Perempuan Kupang sebutnya, sudah sebanyak 85 kasus terhitung tahun 2010-2013. Per April 2014, terdapat sebanyak 23 kasus, yang diadvokasi pihaknya.</p>
26	<p>Senin, 28 April 2014</p>	<p>Pemprov NTT Dinilai Tidak Manusiawi (VN, hal 9)</p>	<p>Pemerintah Provinsi NTT dinilai sangat tidak manusiawi dalam memperhatikan berbagai hak korban <i>trafficking</i> di Medan. Selain karena gaji TKW hanya ala kadarnya. Biaya transport bagi para ke-14 orang TKW hanya diberikan biaya sebesar Rp 1.630.000. Biaya ini tidak termasuk biaya transportasi bagi para orang tua korban.</p> <p>Demikian diungkapkan Divisi Pengaduan dan Pendampingan Kasus PIAR NTT Paul SinlaEloE kepada VN, Minggu (27/4).</p> <p>Paul menilai, uang sebesar ini tidak mencukupi biaya transportasi bagi ke 14 korban untuk sampai ke kampung halamannya. “Para orangtua yang datang menjemput ini tidak diberikan uang transport padahal mereka menjemput anak mereka yang menjadi korban <i>trafficking</i>,” ungkapnya.</p>
27	<p>Selasa, 29 April 2014</p>	<p>Dewan Kecam Alasan Ketiadaan Dana dari Pemprov (VN, hal 9)</p>	<p>DPRD Provinsi NTT mengecam sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang beralasan tidak memiliki dana untuk mengurus pemulangan maupun gaji para TKW, korban penyekapan di Medan. Bahkan kondisinya sangat memprihatinkan pun masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah.</p> <p>Hal ini diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Provinsi NTT Alex Kase kepada N, Senin (28/4). Dia mengatakan, setiap ada masalah apapun yang penyelesaiannya melibatkan Dinas/SKPD, alasan ketiadaan dana menjadi alasan tepat bagi pemerintah untuk lepas tangan. “Biasanya</p>

			perwakilan dari SKPD akan mengatakan bahwa tidak ada dana untuk proses pemulangnya, bahkan dengan mudahnya melemparkan tanggung jawab tersebut kepada PJTKI yang merekrut para korban,” jelasnya.
28	Rabu, 30 April 2014	49 Calon TKI Ilegal Diamankan (VN, hal 1)	<p>Pengiriman secara ilegal TKI asal NTT ke luar daerah/negeri terus terjadi. Baru pekan lalu sejumlah TKW asal NTT ditangkap di Surabaya karena dikirim secara ilegal, kali ini sebanyak 49 calon TKI diamankan saat polisi menggrebek kediaman Evelina Anunut di RT 26/ RW 7 Kelurahan Tuak daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Senin (28/4) malam. Para TKW itu hendak diberangkatkan ke Kalimantan. Namun, diduga kuat, mereka akan dikirim keluar negeri.</p> <p>Pantauan VN pada saat penangkapan, 49 TKI itu kebanyakan perempuan (TKW), dimana tiga orang di antaranya dalam keadaan hamil. Mereka sudah tiga hari ditampung di rumah tersebut. Karena rumah peampungan sempit, hanya berukuran sekitar 4x6 meter, maka kebanyakan para calon TKI itu tidur diteras depan dan teras samping, bahkan ada yang tidur di atas bak air bersih di luar rumah.</p>
29	Rabu, 30 April 2014	TKW Medan Pulang Tanpa Gaji (VN, hal 10)	<p>Lengkaplah sudah nasib para TKW, korban penyekapan di Medan oleh majikannya. Betapa tidak, selain uang transport dari pemerintah yang minimalis, mereka juga pulang ke kampung halamannya dengan tangan hampa, tanpa gaji selama mereka mengabdikan kepada Mohar selama tiga tahun.</p> <p>Direktoris Rumah Perempuan NTT Libby SinlaEloE-Ratuarat kepada VN Selasa (29/4) mengatakan, gaji yang adalah hak korban harus dipenuhi oleh perusahaan, tempat korban bekerja.</p> <p>“Perlu adanya campur tangan pemerintah dan memfasilitasi dalam memperjuangkan hak para korban yang hingga dipulangkan ke kampung halamannya tidak membawa gaji mereka,” ujarnya.</p>